DAFTAR PUSTAKA

Aditama, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*

Azhar Susanto (2008 : 264) dalam bukunya yang berjudul "Sistem Informasi Akuntansi"

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2007, Standard Operating Procedures TATA CARA PENGURANGAN PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas Nomor: A053

Ezar, 2008, *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu* Jakarta : Kencana

Gardinia, 2006 : 10-11, Peran Pajak Bumi dan Bangunan

Hairul Pahmi, 2009, Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Kelly, Roy, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia),* UI Press, Jakarta. halaman : 120

Keputusan DJP No: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan PBB

Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit : ANDI, Yogyakarta

Pasal 19 Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994

Putu Adi Wiradharma, 2007, *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia* Media *Metode Penelitian*

PMK No.110/PMK.03/2009, Pengurusan Administrasi Pengurangan untuk PNS

Rochmat, Soemitro, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung.

Sony, 2010, Penentuan Persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Sudi Santoso, 2010, Alasan Penolakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Suharno, 2003, Pengelolan Pajak Bumi dan Bangunan dalam era Otonomi Daerah

Sujono, 2009, Persentase Pemberian Pengurangan

Sumber:KPP Pratama Bandung Cicadas, Struktur Organisasi

Supriyanto, 1994 : 3, Kontribusi Membayar Pajak

UU No. 12 tahun 1994, Tentang Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

UU No. 12 Tahun 1994, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 19

UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, Tentang Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994

UU No. 12 Tahun 1985 jo.UU Nomor 12 Tahun 1994 Ps 19 jo. 362/KMK.04/1999 jo. KEP-10/PJ.6/1999 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengurangan

Waluyo 2010 : 196, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Widodo dkk, 2010 : 1-2, Keadaan Subyek Pajak